



Tetap Ada Blank Spot di PPDB SMP Kota Jogja

Pembangunan Sekolah Baru tak Masuk APBD

JOGJA – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP di Kota Jogja tahun ajaran 2018/2019 lalu, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemkot Jogja. Pertama kali menerapkan aturan zonasi jarak berbasis RW, beberapa wilayah masuk *blank spot* atau titik kosong. Pada PPDB SMP Kota Jogja tahun ajaran 2019/2020 nanti persoalan yang sama bisa terulang.

Pangkalnya salah satu solusi yang pernah dicetuskan, dengan membentuk SMP negeri baru di wilayah Jogja timur urung dilakukan. Dalam APBD Kota Jogja 2019 tidak ada anggaran untuk pembangunan SMP baru. Artinya untuk PPDB SMP masih dengan 16 SMP negeri yang ada saat ini.

"Memang evaluasi setelah dampak zonasi PPDB SMP tahun ajaran lalu, ada satu wilayah yang tidak ada dukungan sekolah. Arahnya ke situ (membangun SMP negeri baru)," ujar Kepala Bidang Sosial Badan Perencana-

naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Sumitro ketika dikonfirmasi kemarin.

Sudah disiapkan bekas SD Karangari di wilayah Kotagede untuk dijadikan SMP baru. Tapi rencana itu belum akan terealisasi tahun ini. Sumitro mengatakan saat penyusunan APBD 2019 lalu belum memasukan rencana pembangunan SMP baru. Alasannya menunggu aturan zonasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Kalau masih sama (zonasi) dilanjutkan (pembangunan SMP baru), kalau berubah tidak ada pergeseran," ungkapnya.

Ternyata melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB aturan zonasi berbasis jarak masih dipertahankan. Bahkan kuotanya harus 90 persen. "Belum teralokasi (dalam APBD 2019), kesiapan secara fisik bangunan tahun ini kok belum," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi As-

rori mengaku masih menggodok peraturan turunan dari Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Diakukannya evaluasi PPDB tahun ajaran 2018/2019 terkait kekurangan, kelebihan, serta keluhan masyarakat masih dilakukan.

Termasuk sebaran SMP negeri di Kota Jogja yang tidak merata. Hanya ada lima SMP negeri di wilayah Jogja selatan. Termasuk kecamatan Wirobrajan dan Merangsan yang tidak memiliki SMP negeri. Sedang kecamatan Umbulharjo dan Kotagede, dengan wilayah paling luas masing-masing hanya ada satu SMP negeri.

"Terkait dengan rencana pembangunan SMP negeri baru di Jogja timur, Budi masih belum bisa memastikan berapa jumlah dan kapan SMP akan dibangun. Termasuk untuk penambahan kuota peserta didik untuk SMP di wilayah Jogja selatan. Itu ma-



SEVITA EKA NOVRIATA-RADAR JOGJA
Budi Asrori

sih dikaji dengan beberapa pihak terkait. "Masih mengkaji mengenai daya tampung yang akan masuk ke SMP negeri di wilayah tersebut," tuturnya.

Mengenai kemungkinan terulangnya protes dari orang tua wali murid yang masuk area *blank spot*, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumanda-

ru mengaku sudah ada kesepakatan dengan Disdik Kota Jogja. Menurut dia, dalam pertemuan dengan Disdik sebelumnya disepakati SMP negeri baru di Jogja timur bisa dibuka tahun ajaran 2019/2020 nanti. "Memang belum sempurna sekolahnya, tapi paling tidak bisa untuk kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

ADK mengakui dalam APBD 2019 disepakati belum dianggarkan pembangunan SMP negeri baru karena sebelumnya ada informasi kementerian akan menetapkan aturan PPDB berbeda. Tapi sebagai antisipasi, Disdik tenaga guru dan fasilitas penunjang lainnya. "Sambil jalan ditengahi fasilitas sarana dan prasarana, toh bangunannya sudah ada," ujar Ketua Umum PSIM Jogja itu.

Sebelumnya Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan

Data dan Sistem Informasi Pendidikan Disdik Kota Jogja Samiyo mengakui ada permintaan dari legislatif untuk segera membuka SMP negeri baru di Kotagede. Tapi Samiyo mengaku belum berani merealisasikannya karena fasilitas pendukung belum ada. "Antara kelas dan fasilitas SD dan SMP tentu berbeda, kalau dipaksa juga tidak maksimal," katanya.

Terkait dengan antisipasi kembali terulangnya protes masyarakat terkait PPDB SMP, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk mulai mendata jumlah lulusan SD dan domisilinya. Termasuk mulai memetakan warga yang pindah KTP ke Kota Jogja pada 2018 lalu. "Semua masih kami tampung dan buat kajian untuk penyusunan PPDB nanti," paparnya. (cr7/pr/er)



TUNGGU REDA : Para siswa di salah satu SMA di Kota Jogja menunggu hujan reda sebelum pulang. PPDB untuk SD, SMP dan SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 nanti kembali menerapkan zonasi jarak.

SIKUTER ASIA TIKETARA-ROKAR JOGJA

Samakan Persepsi Zonasi Tiap Kabupaten dan Kota

SALAH satu yang baru dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada tahun ajaran 2019/2020 nanti adalah dihapusannya jalur kuota warga tidak mampu. Kemendikbud resmi menghapus sistem Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada PPDB. Itu disebabkan banyaknya orangtua yang menyalahgunakan.

SKTM tersebut memang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kuotanya masuk ke dalam 90 persen jalur zonasi. Penghapusan SKTM itu pun disayangkan oleh pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Dr Haryanto MPd.

"Semangat awalnya kan supaya sekolah tidak terkotak-kotak. Mana yang punya kemampuan ekonomi tinggi dan mana yang tidak," ujar Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan itu kepada *Radar Jogja* beberapa waktu lalu.

Adanya Permendikbud tersebut justru bisa merugikan siswa yang benar-benar miskin. "Itu jadi tidak berpihak pada yang miskin," ungkapnya. Dia berpendapat, jika dalam pelaksanaannya pada tahun lalu SKTM mengalami masalah, maka harus dibenahi. Yakni menyiasati dengan adanya sanksi tegas dan jelas, agar oknum yang menyalahgunakan jera.

Haryanto berpendapat, SKTM diperlukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Layaknya jalur Bidik Misi yang ada di beberapa Perguruan Tinggi. Jalur tersebut dianggap Haryanto sebagai bentuk keberpihakan lembaga pendidikan pada keluarga miskin. "Nah, sekolah sebaiknya juga begitu. Karena tidak bisa jika sekolah hanya menerima orang-orang kaya," jelasnya.

Terkait dihapusannya SKTM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)

Dij R Kadamanta Baskara Aji justru mengaku tidak ada masalah. "Nantinya siswa dari keluarga tidak mampu akan dibantu dengan bea siswa," ujarnya ketika dikonfirmasi. "Dengan zonasi, mau kaya ataupun miskin bisa sekolah yang penting jaraknya dekat," lanjutnya.

Tapi yang disorotinya dalam PPDB nanti adalah untuk menyamakan persepsi antar tiap daerah soal zonasi. Terutama untuk PPDB tingkat SD dan SMP. Untuk SMA/SMK, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangannya di Provinsi. "Besok siang (hari ini) kami kumpulkan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota untuk menyamakan langkah menyikapi keluarnya aturan menteri itu," ujarnya.

Aji mencontohkan beberapa perbedaan penerapan aturan zonasi di kabupaten dan kota, karena ada yang berbasis jarak sekolah ke rumah. Tapi ada pula daerah yang berdasar jarak sekolah ke titik tengah RW. Penyamaan persepsi juga terkait dengan siswa yang tinggal di perbatasan daerah. Beberapa peraturan tersebut pun memunculkan *blank spot*. Terutama bagi calon siswa yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten dan kota. "Akan fokus bersama pada hal itu. Bagaimana agar mereka yang tinggal di (Kecamatan) Depok misalnya bisa ke kota," tuturnya. Aturan zonasi tersebut sejauh ini berlaku untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA/SMK tidak ada pembatasan wilayah.

Sementara itu, untuk kuota zonasi sebesar 90 persen, diakui juga turut menjadi pembahasan yang akan ditinjau Disdikpora Dij bersama dinas-dinas terkait. Pihaknya mengkhawatirkan jika terjadi kebingungan apabila jalur zonasi melebihi kuota 90 persen. "Apa ya mau *disik-disikan*?" kata Aji. (cr9/prc/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005